

BUJUK ASN PINDAH KE IKN

## Presiden Siapkan Rumah Dinas Hingga Tunjangan

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif dan fasilitas, seperti rumah dinas hingga tunjangan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurut Presiden Jokowi, insentif dan fasilitas tersebut diberikan agar tidak ada kendala atau alat saat pemindahan ASN untuk ditugaskan ke IKN. "Sudah disiapkan insentif. Kalau enggak ada ini, alat pasti. Tapi kalau ada insentif kan beda. Rumah dinas, juga ada rumah tapak maupun apartemen. Biaya pindah juga diberikan suami, istri plus anak. Ada tunjangan kemahalan dan fasilitas-fasilitas lainnya," kata Jokowi saat membuka Rakernas Korpri 2023 di Jakarta, Selasa (3/10).

Jokowi menjelaskan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara untuk mewujudkan Indonesia sentris agar pemerataan ekonomi tidak lagi bertumpu di Pulau Jawa atau Jawa sentris.

Menurut Presiden, Pulau Jawa sudah dihuni oleh 56 persen penduduk Indonesia yang jumlahnya mencapai 280 juta jiwa. Artinya, 150 juta penduduk Indonesia berada di Jawa. Sebanyak 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari Jawa, sehingga

perputaran ekonomi hanya berpusat di pulau tersebut.

Oleh karenanya, Kepala Negara menilai daya dukung di Pulau Jawa untuk menampung penduduk sudah tidak kuat lagi, serta pemerataan pembangunan harus digeser ke Kalimantan Timur agar Indonesia sentris.

Untuk memulai IKN Nusantara, Jokowi menekankan perlunya pemindahan ASN Pemerintah Pusat ke Kalimantan Timur. Di sisi lain, ia juga mengakui pemindahan ASN ke luar Jawa terkesan lebih rumit, sehingga dibutuhkan pembenaran insentif. "Memang butuh jiwa pionir. Dulu ditempatkan di luar Jawa saat zaman-zaman dulu juaan ekonomi tidak lagi bertumpu di Pulau Jawa atau Jawa sentris."

Di sisi lain, Presiden meminta ASN tidak alergi terhadap digitalisasi dan perkembangan teknologi, guna membantu Indonesia cepat

mengejar peluang menjadi negara maju.

"ASN jangan alergi terhadap teknologi dan digitalisasi, ini sangat penting," ujar Jokowi.

Presiden mengatakan, Indonesia butuh kelincahan untuk mengejar perubahan yang begitu cepat terjadi, guna menjadi negara maju.

"Butuh kelincahan kita itu, karena perubahannya, berubah-ubah akan sangat cepat sekali, dan juga tidak bisa kita cegah lagi. Mengejanya harus lewat teknologi dan digitalisasi. Karakter itu yang menurut saya harus terus disampaikan kepada seluruh anggota Korpri," pinta Presiden.

Ia kembali mengingatkan apabila Indonesia tidak bisa memanfaatkan peluang, utamanya dalam tiga periode kepemimpinan Presiden ke depan, maka Indonesia bisa terjebak pada negara dengan pendapatan menengah, layaknya yang dialami negara-negara di Amerika Latin sejak era tahun 1950 dan 1960-an hingga saat ini.

"Kalau kita tidak bisa mengubah sistem yang ada, menjadi lebih cepat menjadi lebih baik, menjadi lebih efisien ya kita akan terjebak pada middle income trap, padahal peluangnya besar sekali," jelas Presiden.

(Ant/San)-f

RAKOR FORDASI DI YOGYA 2024

## Di Papua Barat Sepakati 'Pesan Manokwari'

YOGYA (KR) - Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordasi) Daerah Khusus dan Istimewa Tahun 2023 diselenggarakan di Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari, Selasa-Rabu (26-27/9).

Rakor Fordasi ini dibuka Pj Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs Paulus Waterpauw MSI bersama delapan delegasi Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia Daerah Khusus dan Istimewa yang ditandai pemukulan tifa.

Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri RI Valentinus Sudarjanto Sumito SIP MSI. Sedangkan delegasi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diwakili Paniradya Pati Kaisrimawan DIY Aris Eko Nugroho SP MSI.

Berbeda dengan penyelenggaraan Rakor Fordasi tahun lalu di Aceh yang diikuti lima provinsi yaitu DKI Jakarta, DI Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua dan Papua Barat, dalam Rakor Fordasi di Manokwari, Papua Barat tahun ini, diikuti sembilan daerah yang masuk dalam wilayah desentralisasi asimetris. Ada empat daerah menjadi anggota baru Fordasi yaitu Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutan yang dibacakan Paniradya Pati Kaisrimawan DIY Aris Eko Nugroho SP MSI mengatakan, desentralisasi asimetris dirasakan menjadi peluang baru pengaturan hubungan pusat dan daerah untuk Indonesia.

Kebijakan menerapkan desentralisasi asimetris membuka ruang untuk mengakomodasi keberagaman. Setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan



KR-Istimewa

Aris Eko Nugroho SP MSI dalam Rakor Fordasi di Manokwari, Papua Barat.

memberikan ruang kepada daerah untuk mengatur strategi sesuai dengan potensi masing-masing, menjadi harapan kita bersama daerah dapat lebih berkembang.

Dengan demikian, kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan yang terjadi di daerah tidak dengan menerapkan pendekatan *one size fits all*, yaitu adanya satu kebijakan yang dianggap cocok untuk seluruh daerah. Namun, perlu kita pahami bersama, dalam menerapkan kebijakan asimetris kita dihadapkan pada tantangan kompleksitas.

Untuk itu, desentralisasi asimetris tidak boleh melupakan desain konstitusionalnya terlebih dahulu. Sebab, pelaksanaan desentralisasi asimetris merupakan sebuah konsekuensi logis dalam praktik

demokrasi di Indonesia.

Sultan berharap, Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia benar-benar dapat mengakomodasi kebutuhan paling dasar dari rakyat. Diharapkan pula Rakor Fordasi dapat membuka jalan ke arah perbaikan pelaksanaan desentralisasi asimetris, yang tetap diabdikan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dalam Rakor Fordasi bertema 'Bekerja sama untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah' di Manokwari, Papua Barat, menurut Aris Eko Nugroho, sembilan delegasi sepakat menyampaikan 'Pesan Manokwari', tentang komitmen untuk peningkatan daya saing daerah pada daerah khusus dan istimewa.

'Pesan Manokwari' menyebutkan menerima Provinsi Papua Selatan, Provinsi

Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Barat Daya sebagai anggota baru Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia.

Selain itu, jelas Aris, meningkatkan koordinasi kemitraan yang lebih intensif antardaerah desentralisasi asimetris dengan daerah lainnya, dalam rangka membangun kerja sama daerah yang lebih spesifik dan konkret untuk meningkatkan daya saing daerah.

"Disepakati pula untuk mendorong fasilitasi dan dukungan dari Pemerintah Pusat untuk peningkatan daya saing daerah bagi daerah desentralisasi asimetris yang masih rendah," kata Aris kepada KR di ruang kerjanya, Senin (2/10).

Dalam 'Pesan Manokwari' delegasi juga menyepakati bersama-sama Pemerintah Pusat bekerja sama mengatasi persoalan kemiskinan ekstrem dan stunting, inflasi, ketahanan pangan, perubahan iklim dan pemanasan global, kelestarian hutan dan kehilangan keanekaragaman hayati, serta kejahatan lintas batas.

Para delegasi berkomitmen untuk bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban di daerah masing-masing dalam rangka menyukseskan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah, yang diselenggarakan serentak tahun 2024.

Fordasi juga memperjuangkan aspek kekhususan dan keistimewaan desentralisasi asimetris, dan program-program strategis di dalam rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029 kepada Kementerian PPN/BAPPENAS dan Kementerian/Lembaga lainnya.

"Pertemuan selanjutnya Forum Desentralisasi Asimetris tahun 2024 akan dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Aris pula. (Wan)

UU ASN DISAHKAN

## Tak Ada PHK Massal Tenaga Honorer

JAKARTA (KR) - Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (3/10). Sidang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sumfi Dasco Ahmad.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan terima kasih kepada DPR khususnya Komisi II DPR, yang telah memberikan banyak masukan berarti di RUU ASN. Demikian pula kepada elemen lain mulai dari DPD, akademisi, Korpri, Asosiasi Pemerintah Daerah, kementerian/lembaga, forum tenaga non-ASN, hingga berbagai stakeholder terkait yang turut mengawal RUU ASN menjadi UU ASN. "Terima kasih kepada DPR dan semua pihak yang telah mempersembahkan pemikiran terbaik dalam penyusunan RUU ASN ini," ujar Anas.

Salah satu isu krusial dalam RUU ini, kata Menteri PAN-RB, adalah tersedianya payung hukum untuk penataan tenaga non-ASN (honorar) yang jumlahnya mencapai lebih dari 2,3 juta orang, dimana mayoritas berada di instansi daerah.

"Berkat dukungan DPR, RUU ASN ini menjadi payung hukum terlaksananya prinsip utama penataan tenaga non-ASN yaitu tidak boleh ada PHK massal, yang telah digariskan Presiden Jokowi sejak awal," ujar Anas.

"Ada lebih dari 2,3 juta tenaga non-ASN, kalau kita normatif, maka mereka tidak lagi bekerja November 2023. Disahkannya RUU ini memastikan semuanya aman dan tetap bekerja. Istilahnya, kita amankan dulu agar bisa terus bekerja," ujarnya.

Anas mengatakan, akan terdapat perluasan skema dan mekanisme kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga

bisa menjadi salah satu opsi dalam penataan tenaga honorer. "Nanti didetailkan di Peraturan Pemerintah," ujar mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Anas menambahkan, beberapa prinsip krusial yang akan diatur di PP adalah tidak boleh ada penurunan pendapatan yang diterima tenaga non-ASN saat ini. Anas menilai kontribusi tenaga non-ASN dalam pemerintahan sangat signifikan. Pemerintah dan DPR menyatakan agar pendapatan tenaga non-ASN tidak menurun akibat adanya penataan ini. "Ini adalah komitmen Pemerintah, DPR, DPD, Asosiasi Pemda, dan berbagai stakeholder lain untuk para tenaga non-ASN," ujar Anas.

Di sisi lain, lanjut Anas, Pemerintah juga mendesain agar penataan ini tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan bagi Pemerintah. (Ati)-f

## PENYALAHGUNAAN WEWENANG IMPOR GULA Kejangung Geledah Kantor Kemendag

JAKARTA (KR) - Kejaksaan Agung (Kejagung), Selasa (3/10) mengeledah Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang impor gula. Pengeledahan dilakukan usai penyidik resmi menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

Kejangung menduga terjadi tindak pidana korupsi terkait dengan penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan impor gula nasional dan stabilisasi harga. Selain kasus impor gula, Kejagung juga sebelumnya menangani dugaan korupsi terkait dengan ekspor minyak goreng yang melibatkan mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana sebagai tersangka. Dalam kasus yang merugikan negara Rp6,47 triliun itu, Indra Sari telah dipidana 3 tahun penjara.

Terkait pengeledahan tersebut, Mendag Zulkifli Hasan menyebut memang sedang ada 'badai' di kementerian yang terkait dengan pengeledahan oleh penyidik Kejagung pada hari Selasa. "Ya 'kan memang saya masuk (Kemendag) 'badai' sampai sekarang belum kelar, ya," katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/10).

Menurut Zulhas, 'badai' di Kemendag itu terkait dengan perkara mengenai minyak goreng, besi, garam dan lainnya. Namun ia menjamin Kemendag di bawah kepemimpinannya akan mendukung agar 'badai' tersebut bisa tuntas.

"Tetapi pelan-pelan, kemarin kan Kemendag sudah lebaran, Natal, dan tahun baru sudah bisa dikendalikan. Akan tetapi, 'badai' itu masih ada sampai sekarang sisanya, mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan," ujarnya. (Ant/Has)-d

ERICK MINTA MEDIA LEBIH GAUNGGAN

## Baru 50% Masyarakat Tahu RI Tuan Rumah U-17

YOGYA (KR) - Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta media lebih menggaungkan keberadaan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17. Mengingat ada target dari FIFA dalam setiap pertandingan dihadiri 10.000 penonton. Sementara informasi dari penelitian yang dilakukan baru 50 persen masyarakat yang tahu akan adanya pertandingan tingkat dunia pada 10 November hingga 2 Desember mendatang.

Erick Thohir mengemukakan hal tersebut dalam konferensi pers secara hybrid dalam *SCM'S Announcement the FIFA U-17 World Cup Indonesia 2023* di SCTV Tower, Jakarta Pusat, Selasa (3/10) sore. Erick Thohir didampingi Director Programming SCM Harsiwi Achmad, CEO VIP Indra Yudhistira dan Direktur IEG Hendy Liem.

"Selain sebagai tuan rumah, pelaksanaan Piala Dunia U-17 akan menjadikan Indonesia panggung dunia. Harapannya juga mencetak prestasi nasional," tandas Erick.

Laga perdana Timnas U-17 akan dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya menghadang Tim Ekuador pada Jumat (10/10) yang disiarkan langsung mulai pukul 18.00 (kick off pukul 19.00). Pertandingan ini akan diawali opening ceremony FIFA U-17 World Cup Indonesia 2023. Sebelumnya berlangsung pertandingan lainnya dari Group A di venue yang sama antara Panama vs Morocco pada pukul 15.30 WIB (kick off pukul 16.00 WIB).

Untuk menghadirkan penonton, lanjut Erick, pihaknya bakal memaksimalkan penjualan tiket. FIFA telah menjual tiket Piala Dunia U-17 2023 dengan harga termurah Rp 75.000. Erick mengaku tidak khawatir, meski pertandingan itu ditayangkan televisi. "Mengingat sensasi nonton di lapangan itu berbeda. Makanya, persiapan Timnas Indonesia U-17 menjadi penting. Kami juga mempunyai paket-paket yang akan kami lakukan terkait tiket," tambahnya sembari menjelaskan kerja samanya dengan pihak lain.

Harsiwi Achmad menyambut baik kepercayaan FIFA kepada SCM Grup untuk dapat menyiarkan seluruh pertandingan secara eksklusif melalui multiplatform yang dimiliki. Dengan cakupan jangkauan yang luas, Harsiwi berharap seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati FIFA U-17 World Cup Indonesia 2023. "Dan turut bangga menyaksikan kemegahan pesta sepak bola dunia kelompok umur ini dilaksanakan di bumi pertiwi," tutur Harsiwi Achmad.

Dijelaskan, SCM Grup akan menyiarkan seluruh pertandingan yang terbagi melalui siaran live *free to air* di Indosiar dan SCTV. Sebanyak 32 pertandingan akan ditayangkan Indosiar sementara SCTV akan menyiarkan 18 pertandingan. Opening Ceremony FIFA U-17 World Cup Indonesia 2023 akan ditayangkan serentak oleh Indosiar, SCTV, serta Vidio. (Fsy)-f



KR-Antara/Andreas Fitri Atmoko

BATIK SODAGARAN LAWASAN: Pengunjung mengamati koleksi batik pada Pameran Batik Sodagaran Lawasan bertajuk 'Batikmu Batikku Batik Kita Batik Indonesia Mewarnai Semesta' di Museum Sonobudoyo, Yogyakarta, Selasa (3/10/2023). Pameran yang digagas Paguyuban Pencinta Batik Indonesia (PPBI) Sekar Jagad dan menampilkan koleksi batik dari berbagai tahun itu berlangsung hingga 8 September 2023.